

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perusahaan melakukan aktivitas usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pihak-pihak yang ada dalam perusahaan saja tetapi juga secara tidak langsung berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas usahanya tentu memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terkait langsung dengan perusahaan. Keberadaan dan dampak aktivitas perusahaan seringkali bertentangan bahkan merugikan kepentingan pihak lain. Perbedaan kepentingan tersebut jika tidak ditindaklanjuti maka akan mempengaruhi aktivitas dan eksistensi perusahaan, oleh karena itu seharusnya perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan perusahaan saja, tetapi juga mencermati kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan.

Munculnya isu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi disekitar areal pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangki pengangkutan minyak yang bocor, dan sebagainya merupakan akibat negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperdulikan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan bumi ini. Munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), analisis *stakeholder*, dan sejenisnya merupakan respons atas tindakan perusahaan yang

telah merugikan masyarakat dan bumi yang kita huni ini (Agoes dan I Cenik, 2011:89).

Topik tanggung jawab sosial perusahaan ini mulai mengemuka ditahun 1970-an, melalui tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggung jawab social dari kegiatan bisnis. Di Indonesia sendiri sejak tahun 1980-an, telah dibahas mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan akuntansi sosial (*social accounting*). Secara khusus Bambang Sudibyo (1988) menyimpulkan bahwa terdapat dua hal yang menjadi kendala sulitnya penerapan akuntansi sosial di Indonesia yaitu (1) Lemahnya tekanan sosial yang menghendaki pertanggungjawaban sosial perusahaan dan (2) Rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini diperkuat oleh survey yang dilakukan oleh Suprato (2007) pada 375 perusahaan yang ada di Jakarta. Hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 166 perusahaan tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Novriadi, 2014).

Penerapan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) yang disosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Menurut Nor Hadi (2011: 206), laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan (*annual report*) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku berakhir (Sari,2012).

Seluruh perusahaan berbagai sektor bisnis di Indonesia sebagian besar mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan sebagian besar perusahaan di Indonesia merupakan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Selain usaha terhadap perbaikan lingkungan, perusahaan juga berpartisipasi didalam pengabdian masyarakat, seperti memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan sebagainya (Kaba,2014).

Corporate Social Responsibility Disclosure pada gilirannya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Citra (*image*) dan kepercayaan terhadap perusahaan akan meningkat. Investor juga akan mempertimbangkan hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk berinvestasi. Dengan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan, diharapkan perusahaan berjalan dengan lebih baik dan dapat menjaga eksistensinya. Menurut Siregar (2007: 285), program *Corporate Social Responsibility* lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan (Sari,2012).

Di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan (Sunyoto dan Wika Harisa, 2016:110) :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Undang-undang merupakan norma tertulis yang bersifat wajib dan mempunyai sanksi hukum bagi para pelanggarnya. Dengan diaturnya tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam norma peraturan perundang-undangan, bisa dipahami bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan.

Dewan komisaris adalah wakil *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Semakin besar jumlah

anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial.

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat *leverage* perusahaan menggambarkan risiko keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah.

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa perusahaan besar merupakan entitas bisnis yang tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial.

Heinze (1976) dalam Kaba' (2014) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Komisaris Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Sedangkan objek yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

Berbagai penelitian terkait dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Sitepu (2009) dengan variabel independen yang diteliti ukuran dewan komisaris, *leverage*, *size* dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasinya. Hasil penelitian membuktikan ukuran dewan komisaris dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sedangkan *leverage* dan *size* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penelitian yang dilakukan oleh Purnasiwi (2011) dengan variabel independen yang diteliti ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasinya. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penelitian yang dilakukan oleh Kaba' (2014) dengan variabel independen yang diteliti ukuran dewan komisaris, tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham asing, dan kepemilikan saham publik pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasinya. Hasil penelitian membuktikan ukuran dewan komisaris, tipe industri, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan saham asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015) dengan variabel independen yang diteliti ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasinya. Hasil penelitian membuktikan profitabilitas dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sedangkan ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penelitian ini dilakukan karena ketidakkonsistenan pada beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian Subiantoro (2015) menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan penelitian Wijaya (2012) menyatakan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. Penelitian Purnasiwi (2011) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Pradnyani dan Sisdyani (2015) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Sitepu (2009) dan Kaba' (2014) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan penelitian Chuzairi (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan hasil yang tidak konsisten dari berbagai penelitian terdahulu, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan informasi sosial. Sektor pertambangan dipilih menjadi sampel penelitian karena sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap berbagai aspek, mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang nantinya akan mengurangi pengangguran. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perusahaan pertambangan paling berkontribusi besar terkait dengan kerusakan alam yang terjadi di kawasan Indonesia (Metrosiantar.com, 20 Januari 2014). Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) juga menyebutkan bahwa kerusakan alam di Indonesia pada tahun 2017 sangat tinggi diakibatkan oleh aktivitas manusia salah satunya aktivitas pertambangan (news.metro24jam.com).

Berikut ini merupakan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia dan menjadi pemicu berkembangnya praktik CSR (Utama, 2007), yaitu : peristiwa yang terjadi pada PT Adaro Energy Tbk sekitar bulan Oktober 2009, dimana dalam peristiwa ini ikan-ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Balangan mati akibat tercemarnya sungai Balangan sehingga mengakibatkan kerugian materi yang ditaksir hingga miliaran rupiah (Rahman, 2009). Kasus terkait aktivitas perusahaan yang berdampak buruk terhadap lingkungan juga terjadi di Kalimantan. *Greenpeace* Indonesia mencatat 45% dari sekitar 3.000 kilometer panjang sungai di Kalimantan berpotensi mengalami kerusakan akibat limbah dari perusahaan pertambangan batubara. Dinyatakan pula 18 dari 29 sampel ditemukan sebagai bocoran atau buangan dari kolam penampungan dan bekas lubang tambang yang mengalir langsung ke lingkungan (www.antarakalbar.com, Desember 2014). *Greenpeace* mengungkapkan fakta bahwa aktivitas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perusakan bentang alam dan mengganggu kualitas air tanah. Pemerintah lokal bahkan tanpa sadar mendukung perusakan tersebut. Bahkan saat ini 75% luas wilayah Kalimantan Timur sudah menjadi konsesi pertambangan batubara (www.greenpeace.org, Maret 2016).

Alasan lain dipilihnya industri pertambangan karena industri pertambangan dimaksudkan untuk menghindari adanya *industrial effect* yaitu risiko industri yang berbeda antara suatu sektor industri yang satu dengan yang lain. Selain itu sektor pertambangan juga lebih dekat dengan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk

mengambil judul penelitian “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah ukuran dewan komisaris, tingkat *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap jumlah informasi sosial yang diungkapkan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, tingkat *leverage*, ukuran perusahaan, dan tingkat profitabilitas perusahaan terhadap jumlah informasi sosial yang diungkapkan baik secara simultan maupun secara parsial dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan tentang pengungkapan tanggung jawab perusahaan (CSR) dalam memasuki dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan acuan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menjelaskan hipotesis yang akan diajukan serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

BAB IV: Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan-perusahaan pertambangan yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : Pada bab ini mengemukakan hasil analisis data yang telah dilakukan, berupa perhitungan dan hasil akhir yang diperoleh.

BAB VI: Pada bab ini menjelaskan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran bagi pihak yang terkait.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau